

## **Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di Pondok Pesantren Manahijussadat Banten**

**Anas Fauzi<sup>1</sup> Fauzan<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
anasfauzi270@gmail.com

### **Abstract**

*The curriculum has an important role in the quality of education. Curriculum implementation in Indonesia is centered on the government but is the authority of each madrasah, because this type of curriculum implementation model, which is called top down up, is used in our country. The 2013 curriculum is now a reference that is considered effective for student behavior, so the government will implement it in all educational institutions in Indonesia, both public and private schools. Madrasah are private schools under the auspices of the department of religion, often madrasah are neglected by the government's appreciation, but we need to know that madrasah have carried out many innovations and evaluations of the 2013 curriculum. In this way the author discusses things that can be evaluated on factors that support the implementation of the curriculum 2013 at the Manahijussadat Islamic Boarding School, especially at the Manahijussadat Islamic Boarding School Madrasah Aliyah. In this research, researchers used qualitative descriptive methods with data collected using participant observation, in-depth interviews and documentation. This research resulted that an evaluation of curriculum implementation at the Manahijussadat Islamic boarding school was carried out covering aspects of teacher preparation, facilities and infrastructure, principal management, school environment, community and financing. Curriculum evaluation on these aspects has been carried out well and the evaluation results are used as a basis for improving the quality of the learning curriculum for the next school year.*

*Keywords: Curriculum 2013, Curriculum Evaluation, Islamic Boarding School.*

### **Abstrak**

Kurikulum memiliki peranan penting terhadap kualitas pendidikan. Penerapan kurikulum di Indonesia berpusat pada pemerintah namun menjadi kewenangan bagi masing-masing madrasah, karena model implementasi kurikulum seperti ini yang disebut top down up digunakan di Negara kita. Kurikulum 2013 kini menjadi acuan yang dianggap efektif pada perilaku siswa sehingga pemerintah akan menerapkannya di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta. Madrasah adalah sekolah swasta di bawah naungan departemen agama, sering kali madrasah terabaikan oleh apresiasi pemerintah, namun kita perlu ketahui bahwa madrasah banyak melakukan inovasi dan evaluasi terhadap kurikulum 2013. Dengan demikian penulis membahas hal-hal yang dapat dievaluasi pada faktor-faktor terdukungnya implementasi kurikulum 2013 di Pondok Pesantren Manahijussadat khususnya di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Manahijussadat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa evaluasi pelaksanaan kurikulum di pondok pesantren manahijussadat dilakukan meliputi aspek persiapan guru, sarana dan prasarana, manajemen kepala sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat, dan pembiayaan. Evaluasi kurikulum

pada aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan hasil evaluasi dijadikan dasar dalam peningkatan kualitas kurikulum pembelajaran tahun ajaran selanjutnya.

Keyword: Kurikulum 2013, Evaluasi Kurikulum, Pondok Pesantren.

## **Pendahuluan**

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting untuk menumbuhkan semangat beragama, mengembangkan berbagai kompetensi keilmuan dan keterampilan siswa dan memelihara moralitas anak bangsa yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan sejarah, Indonesia sepatutnya sangat bangga terhadap Madrasah khususnya dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan (kurikulum) pelajaran umum. peran dan kontribusi madrasah terkait dengan departemen Agama. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan islam di Indonesia. Oleh karena itu penting diungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan di Madrasah.<sup>2</sup>

Meskipun telah berjasa dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, namun eksistensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan belum mendapat pengakuan yang sewajarnya dari pemerintah bahkan dihadapkan pada diskriminasi dan marginalisasi. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga UU. No. 2 Th. 1989 dan PP No. 28 dan 29 Tahun 1990 keluar. Perubahan terjadi secara historis dapat ditelusuri dari keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975, sebagai respon atas tuntutan para tokoh muslim akan realitas diskriminasi yang dialami oleh madrasah. Meskipun judul SKB tersebut adalah "peningkatan mutu pendidikan pada madrasah" namun misi implisitnya di lapangan adalah kesetaraan dan kesejajaran pondok pesantren dengan sekolah umum. Kebijakan ini berkonsekuensi pada keharusan restrukturisasi dan reformulasi kurikulum pondok pesantren yaitu dengan memasukkan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih besar dan berkurangnya porsi mata pelajaran agama. Dengan struktur kurikulum seperti ini diharapkan lulusan madrasah khususnya yang berada di bawah naungan pondok pesantren mendapatkan hak dan peluang sama seperti yang diperoleh lulusan sekolah umum, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Meskipun sudah dianggap setara dengan sekolah umumnya, madrasah masih menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan cita substantif perubahannya tersebut. Berangkat dari realitas tersebut, dipandang perlu mengaji implementasi perubahan (transformasi) madrasah dalam format barunya tersebut. Dari kajian ini diharapkan diperoleh deskripsi berbagai hal penting terkait dengan implementasi perubahan madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model pengelolaan madrasah sebagai tawaran untuk meningkatkan kualitas madrasah. fokus penelitian ini adalah pada komponen pokok sebagai lembaga pendidikan yaitu kurikulum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhasnawati (2015), Pendidikan Madrasah dan Prospeknya dalam Pendidikan Nasional, Potensia: Vol. 14, h. 86.

<sup>2</sup> Rahmat (2014), Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sistem dan Perkembangannya sebelum dan sesudah kemerdekaan), Rihlah, Vol. 1, No. 2, h. 54.

<sup>3</sup> Sirpa'at (2011), Transformasi Madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan: Vol. , No. 1, h. 157.

Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sudah mengalami sepuluh kali perubahan. 1947 Rencana Pelajaran, dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, 1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, 1984 Kurikulum 1984, 1994 Kurikulum 1994, 1997 Revisi Kurikulum 1994, 2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2013 Kurikulum 2013.

Perubahan kurikulum sebagai Implementasi KTSP tahun 2006 masih belum optimal karena kompetensi guru dan sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta sistem penilaian yang masih lemah. Pergantian kurikulum ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. KTSP baru diterapkan selama 6 (enam) tahun yang lalu, namun pemerintah, sudah bersiaga menyiapkan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013. Sejak konsep kurikulum 2013 diperkenalkan oleh Pemerintah telah banyak tanggapan dari masyarakat umum, para professional, dan anggota DPR-RI. Sikap mereka ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Mayoritas dari mereka mengusulkan supaya pelaksanaan kurikulum 2013 ditunda, dan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Namun Pemerintah tetap menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli 2013.<sup>4</sup>

Selama ini, banyak tim penyusun kurikulum yang *notabene* berasal dari para ahli kurikulum, ahli pendidikan, ahli di bidang mata pelajaran tertentu dan ahli lain di luar semua itu menganggap dan meremehkan kompetensi guru. Padahal, saat ini, tingkat pendidikan guru banyak yang menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3. Banyak di antara mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas di atas rata-rata guru yang lain, bahkan banyak juga yang melebihi kompetensi dosen. Oleh karena itu, pandangan sebelah mata yang merendahkan kompetensi guru, bahkan menganggap guru hanya bisa dan cukup mengajar di depan kelas, hendaknya mulai ditinggalkan, manakala menghendaki kurikulum yang dihasilkan oleh tim kurikulum benar-benar akan dapat diterapkan di lapangan dengan baik.<sup>5</sup> Bahkan sesungguhnya guru sendiri lah yang paling berhak pada penyusunan kurikulum.

Tiga peranan penting kurikulum yaitu peranan konservatif, peran kreatif dan peran kritis/evaluatif:

1. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadikan sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses social. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat

---

<sup>4</sup> Subandi (2014), Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi Analisis dan Substantif Kebijakan Kurikulum Nasional), Terampil (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran dasar): Vol. 1, No. 1, h. 19.

<sup>5</sup> Nurhasnawati (2015), Pendidikan Madrasah dan Prospeknya dalam Pendidikan Nasional, Potensia: Vol. 14, h. 2.

2. Peranan kreatif perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya.
3. Peranan kritis dan evaluatif peranan ini di latarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, komite madrasah, guru-guru, dan santri. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah “Swasta” Pondok Pesantren Manahijussadat Serang Banten. Data dikumpulkan secara *snowball*. Keabsahan data dilakukan dengan kriteria triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi waktu yang meliputi, cek, recek, dan kroscek. Langkah-langkah analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, penyaringan data, klasifikasi data, dan penarikan simpulan. Langkah-langkah tersebut berjalan hingga penelitian selesai.

## Hasil dan Pembahasan

Madrasah Aliyah “Swasta” di Serang Banten ini, merupakan salah satu madrasah yang berada di bawah yayasan pondok pesantren putra putri dengan jumlah santri 700 orang. Madrasah ini memiliki rombongan belajar kelas X, XI, dan XII, sehingga total ada sebanyak 9 rombongan belajar. Jumlah Siswa MA Putra dan putri yaitu sebanyak 276 orang. Madrasah Aliyah ini menyatu dengan Madrasah Tsanawiyah, Keseluruhan Seluruh santri MTs dan MA tinggal di dalam pesantren, sehingga mereka mendapat tambahan ilmu agama mulai dari ilmu nahwu, tajwid, bahasa arab, fikih, sejarah Islam dan berbagai ilmu keagamaan lainnya. Di bawah ini adalah evaluasi kurikulum yang telah dilakukan MA Manahijussadat berdasarkan hasil wawancara kepada ustadzah di Manahijussadat dan pengamatan penulis:

### 1. Kesiapan guru

Pada kesiapan guru yang dapat dievaluasi tentu kepada hal yang wajib disiapkan guru dalam administrasi maupun metode pengajaran di kelas. Permasalahan: Guru MA Manahijussadat tidak mendalam pada konsep administrasi seperti membuat silabus, teknik penilaian, menyusun KKM, Program tahunan, Program semester dan lainnya, namun suatu kelebihan dalam pembelajaran para guru mempersiapkan secara matang apa saja hal yang akan disampaikan sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan sejelas-jelasnya. Pembuatan

---

<sup>6</sup> Moch. Yasakur (2014), Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah Bogor, Edukasi Islami Pendidikan Islam: Vol. 3. H. 55.

RPP yang merupakan syarat pencairan dana BOS adalah suatu inovasi sekaligus evaluasi yang mendidik profesionalitas guru MA. Manahijussadat berdasarkan keterangan “Ustadzah Khoirunnisa (Alumnus dan santri yang mengabdikan)” terdukungnya fasilitas yang memadai yaitu luasnya tempat belajar, para guru menerapkan berbagai metode pembelajaran hingga menarik perhatian siswa.

**Penilaian Kurikulum 2013 di MA. Manahijussadat :** poin ini merupakan suatu masalah terbesar pada kesiapan guru, guru Ma. Manahijussadat hanya memperhatikan kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan seperti kurikulum 2006. Pada web pemerintah.net dijelaskan hakikat penilaian pada kurikulum 2013 ini lah yang pantas disebut penilaian autentik karena mengukur kompetensi sikap, sosial, keterampilan dan pengetahuan.<sup>7</sup> standar penilaian pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada prinsip-prinsip kejujuran yang mengedepankan aspek-aspek berupa *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Salah satu bentuk dari penilaian itu adalah penilaian otentik. Penilaian otentik disebutkan dalam kurikulum 2013 adalah model penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tiga komponen di atas. Diantara teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut.

- a. **Penilaian kompetensi sikap.** Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.
- b. **Penilaian Kompetensi Pengetahuan,** menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
- c. **Penilaian Kompetensi Keterampilan,** Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.

## 2. Kondisi sekolah atau ketersediaan sarana prasarana

Pada keputusan BSNP mengenai sarana prasarana bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

---

<sup>7</sup> Kunandar (2014), Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan Kurikulum 2013), Depok, Raja Grafindo Persada, h. 37.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Permasalahan: Terdapat 6 rombongan belajar di MTs Manahijussadat yang tidak memiliki kelas tertutup, melainkan melakukan KBM dialam terbuka atau di masjid, namun pada MA. Manahijussadat sudah semua memiliki kelas. Dengan demikian sering terkendala saat hujan turun, para siswa MTs yang tidak memiliki kelas pasti libur. Adapun sarana yang terdapat di MA Manahijussadat :

1. Masjid (sebagai pusat kegiatan santri)
  2. Asrama Santri dan Guru/Ustadz
  3. Ruang Belajar, Praktek dan Aula Serba Guna
  4. Lab. Komputer
  5. Lab. Alam (Lahan Praktek)
  6. Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren)
  7. Lapangan Olahraga (Bola Kaki, Volly, Takraw, Badminton, Basket, Tennis Meja, Futsal, dll)
  8. Koperasi (Warung Serba Ada) dan Kantin
  9. BMT El-Manahij (Melayani Tabungan Santri dan Administrasi Keuangan Pondok).
3. Manajemen kepala sekolah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 pasal 12 ayat 1 bahwa: “kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana”. Dengan demikian sumber keberhasilan yang utama pada sekolah adalah menegement yang dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri.<sup>8</sup>

Manajemen kepala sekolah MA. Manahijussadat tetap beracuan kepada Mudir Pesantren (Kiyai) yang tentunya telah diatur oleh kepala sekolahnya sendiri dan mengikuti aturan nasional seperti pada umumnya. Evaluasi yang telah dilakukan pemerintah terhadap kinerja kepala sekolah MA. Manahijussadat yaitu dengan adanya penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selalu diselenggarakan setiap satu tahun sekali.

Kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja pelaksanaan kerja hasil kerja pencapaian kerja dan unjuk kerja. menurut Anwar prabu kinerja prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. sedangkan menurut Supardi pengertian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja ialah suatu hasil kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab oleh seorang pegawai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>8</sup> Novianti Javry (2016), Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian keunggulan bersaing dan kecerdasan emosi), Yogyakarta, deepublish, h. 3.

#### 4. Lingkungan sekolah

Lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti "sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya". Dengan demikian lingkungan merupakan "segala sesuatu yang berada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh terhadap karakter atau sifat seseorang secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>9</sup> lingkungan sekolah meliputi benda hidup dalam bentuk manusia terdekat yang melingkupinya yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan pertama, karena manusia mendapatkan pendidikan yang pertama kalinya sebelum mengenal lingkungan yang lainnya.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua. Siswa-siswa, guru, administrator, konselor hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Menurut Dalyono lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan sekolah yaitu keadaan sekolah tempat belajar yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Keadaan gedung sekolahnya dan letaknya, serta alat-alat belajar yang juga ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. Menurut Oemar Hamalik lingkungan sekolah adalah sebagai tempat mengajar dan belajar. Sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan pengajaran dan kesempatan belajar harus memenuhi bermacam-macam persyaratan antara lain: murid, guru, program pendidikan, asrama, sarana dan fasilitas. Segala sesuatu telah diatur dan disusun menurut pola dan sistematika tertentu sehingga memungkinkan kegiatan belajar dan mengajar berlangsung dan terarah pada pembentukan dan pengembangan siswa.

M.A. Manahijussadat tentu selalu bernuansa islam karena semuanya adalah para santri yang selalu ditanamkan nilai-nilai keagamaan khususnya pada akhlak dan pembentukan karakter. Sebagaimana rasulullah saw. yang mengajarkan dan menularkan pada sahabatnya mengenai akhlak mulia. Pada masa itu para sahabat rasul hidup bersama dengan rosul, berdiskusi dan bermajlis langsung dengan rasul. Rasulullah saw. juga banyak menggunakan metode bercerita dalam mewujudkan karakter sahabatnya yang baik serta merubah kejahiliyahan bangsa Arab menjadi kemuliaan.<sup>10</sup>

#### 5. Komite sekolah/masyarakat

Komite sekolah atau dewan sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi dari para guru, orang tua dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan sekolah. Komite sekolah yang ada di luar negeri contohnya di Boston yaitu salah satu negara bagian di Amerika serikat. Komite sekolah yang dikenal dengan nama the Boston school committe.

Komite sekolah juga sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi misi dan tujuan dari sekolah menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan menggunakan mengelola dan mengevaluasi dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi siswa.

---

<sup>10</sup> Yusuf dan Syamsul (2001), Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, h. 54.

Peran komite sekolah dalam kepmendiknas nomor 044/U/2002 adalah pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan dan penghubung antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan.<sup>11</sup>

Adapun pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Manahijussadat, sekolah tidak melibatkan wali santri untuk menjadi komite sekolah, sehingga informasi kegiatan sekolah dan pesantren hanya bersumber dari siswa ataupun para ustadz dan ustadzah sebagai jalan untuk para wali santri di rumah. Namun meski demikian pertemuan wali santri selalu diadakan setiap tahunnya dan setiap kelas memiliki ustadzah yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut serta melakukan hubungan yang cukup baik dengan wali santri tersebut.

#### 6. Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Pada kitab Ta'limuta'allim pun disebutkan mengenai syarat menuntut ilmu dari Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib ra. dua bait syair itu berbunyi:

أَلَا لَا تَنَالُ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنَبِّئُكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيَانٍ

دِكَاٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْعَةٍ وَإِزْشَادٍ أُسْتَاذٍ وَطُولِ زَمَانٍ

Artinya: *"Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi enam syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci. Yaitu: Kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama."*

Dari syair tersebut pada poin ke 4 yaitu biaya, karena seorang penuntut ilmu membutuhkan bimbingan guru dan sarana pra sarana lainnya dalam belajar sehingga diperlukannya biaya, dengan menggunakan kurikulum apapun tetap biaya itu dibutuhkan.

<sup>11</sup> Wahyu Dwi Mulyno (2016), Peran Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, h. 3.



## PERSYARATAN KEUANGAN MA PONDOK PESANTREN MANAHIJUSSADAT

1.	Uang Pendaftaran	= Rp. 150.000,-
2.	Infra Bangunan	= Rp. 4.000.000,-
3.	Uang Bulanan	= <u>Rp. 750.000,-*</u>

**Jumlah** **= Rp. 4.900.000,-**

\*Sudah termasuk biaya sekolah, makan 3 x sehari, asrama, listrik, air, layanan kesehatan dan biaya ujian. (pontrenmanahijussadat.blogspot.com).

Permasalahan: income dari hasil pembayaran SPP peserta didik berjumlah sangat kecil sehingga banyak hal seperti pembangunan dan kebersihan yang kurang teratasi karena tidak adanya petugas kebersihan khusus. Namun ada saja donator dan pewakaf yang memberikan hartanya untuk pembangunan sekolah, sekalipun pesantren tidak memiliki donatur tetap.

### Pembahasan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sisdiknas). Definisi kurikulum berdasarkan UU Sisdiknas tersebut terdapat tiga komponen penting yang ada dalam kurikulum yaitu komponen tujuan pendidikan, komponen proses, dan komponen evaluasi. Beauchamp mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*a process of putting the curriculum to work*". Fullan mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*".

Berdasarkan dua pendapat di atas, sesungguhnya implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) kedalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum yaitu pembelajaran.<sup>12</sup> Kurikulum memiliki peranan penting atas kualitas pendidikan.<sup>13</sup>

Implementasi Kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

1. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan.
2. Strategi implementasi: yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
3. Karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.

<sup>12</sup> Suyatmini (2017), Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pelaksanaan Pembelajaran Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Ilmu Sosial, 27 (1), h. 60.

<sup>13</sup> Ismail Suardi (2017), Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah : Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 02 (1), h. 1.

Sejalan dengan uraian di atas, Mars 1998 mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang dalam diri guru sendiri. Dari beberapa faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor yang lain.<sup>14</sup>

Adapun Michael Fullan telah membahas faktor pokok yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. karakteristik perubahan, meliputi:
  - a. relevansi dan kebutuhan perubahan;
  - b. kejelasan;
  - c. kompleksitas;
  - d. mutu dan program bisa dipraktikkan.
2. karakteristik sekolah di tingkat daerah, sejarah usaha inovatif, proses adopsi, dukungan administratif pusat, pengembangan staf dalam jabatan dan keikutsertaan, garis waktu dan sistem informasi. tampilan dan karakteristik masyarakat.
3. karakteristik di level sekolah: karakteristik prinsip dan kepemimpinan, karakteristik guru dan hubungan, karakteristik siswa dan kebutuhan.
4. karakteristik eksternal menuju sistem lokal: peran para agen pemerintah, dan dana-dana eksternal.

Seluruh faktor-faktor tersebut sesungguhnya belum semuanya dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Manahijussadat.<sup>15</sup>

Wina Sanjaya menyatakan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen yaitu:

#### 1. Komponen Tujuan

Komponen tujuan kurikulum berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, tujuan kurikulum berkaitan dengan filsafat atau nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.

#### 2. Komponen Isi/Materi Pembelajaran

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktifitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan

#### 3. Komponen Metode/Pencapaian Tujuan

Metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Metode meliputi rencana, strategi dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal.

<sup>14</sup> Mulyasa (2009), Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 180.

<sup>15</sup> Siskandar (2016), Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah (2016), Cendekia: vol. 10, No. 2. h. 127.

#### 4. Komponen Evaluasi

Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.<sup>16</sup>

Menurut Majid, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum adalah: (1) kesiapan guru, (2) kondisi sekolah atau ketersediaan sarana prasarana, (3) manajemen kepala sekolah, (4) lingkungan sekolah, (5) komite sekolah/masyarakat, dan (6) pembiayaan pendidikan. Hal senada juga dijelaskan oleh Mulyasa, inilah acuan utama penulis dalam mengungkap faktor-faktor keberhasilan dan implementasi kurikulum 2013 di MA. Manahijussadat. keberhasilan kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses).

Kunci sukses implementasi evaluasi kurikulum 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 2. Kreativitas Guru 3. Aktivitas Peserta Didik 4. Sosialisasi Kurikulum 2013 5. Fasilitas dan Sumber Belajar 6. Lingkungan yang Kondusif Akademik 7. Partisipasi Warga Sekolah Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Majid dan Mulyasa, bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum adalah kesiapan guru, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana prasarana, manajemen kepala sekolah, Aktivitas Peserta Didik, lingkungan sekolah, Sosialisasi Kurikulum 2013, dan pembiayaan pendidikan adalah benar, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat implementasi kurikulum 2013.<sup>17</sup>

#### Kesimpulan

Evaluasi implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan MA. Manahijussadat pada persiapan guru, sarana pra sarana, manajemen kepala sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar dan pembiayaan telah dilakukan dengan baik. Sehingga mengakibatkan dan mengefektifitaskan terhadap subjek pendidikan yaitu guru dan objek pendidikan yaitu murid. Faktor-faktor itulah yang sangat utama terjadinya evaluasi pada kurikulum 2013 yang diterapkan pada MA. Manahijussadat.

Penilaian yang seharusnya dilakukan pada kurikulum 2013 adalah penilaian yang autentik sehingga penilaian siswa dilihat dari segi afektif, psikomotorik dan kognitif, namun pada MA. Manahijussadat masih hanya menilai segi kognitif saja pada rapor siswa meskipun saat pembelajaran di MA. Manahijussadat juga ditekankan kepada Afektif dan sosialnya. Pada sisi ini peneliti hanya dapat menuliskan hasil wawancara terhadap guru dan belum bisa memberikan motivasi dan solusi untuk para guru MA. Manahijussadat dalam menggunakan system penilaian yang autentik.

Para guru mendapatkan pelatihan saat diadakannya sesekali guru keluar karena pelatihan diselenggarakan tingkat kecamatan, guru selalu menggunakan sistem reward dan punishment

<sup>16</sup> Julfahnur dan Mustika Ratu, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SMA. h. 3.

<sup>17</sup> Dwi Anggi (2016), Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru Mata pelajaran PPKN di SMA Negeri se-kota Palembang, Bhineka Tunggal Ika: Vol. 3, No. 1, h. 81.

namun sangat disayangkan guru pada MA Manahijussadat pada penilaian hanya menilai aspek pengetahuan, adanya kiayi dapat menguatkan kepala sekolah di Manahijussadat baik pada Mtsnya maupun MA. nya, sarana pra sarana sangat dicukupkan demi terciptanya antusias siswa dalam pelajaran, lingkungan yang islami merupakan faktor pendukung terbesar dalam pembentukan karakter anak, adanya masyarakat yang cukup mendukung program pesantren dapat menyukseskan evaluasi dan inovasi yang ada dan pembiayaan sebagai salah satu income untuk menyokong evaluasi kurikulum 2013 di MA. Manahijussadat.

## Referensi

- Budi Budaya (2017), Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang efektif, Likhitaprajana: Vol.18, No. 1
- Dwi Anggi (2016), Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru Mata pelajaran PPKN di SMA Negeri se-kota Palembang, Bhineka Tunggal Ika: Vol. 3, No. 1
- <http://www.pontrenmanahijussadat.blogspot.com>
- Indri Anugraheni (2018), Pengembangan media Pembelajaran Kurikulum 2013 di kelas IV, Filosaria Kristin, Vol. 8, No. 3
- Ismail Suardi, Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah : Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim, Tadris (2017): Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 02 (1)
- Julfahnur dan Mustika Ratu, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SMA
- Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan Kurikulum 2013), Depok, Raja Grfindo Persada: 2014
- Moch. Yasakur, Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah Bogor (2014), Edukasi Islami Pendidikan Islam: Vol. 3
- Muhammad Nasir, Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2
- Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2009), Jakarta: PT Bumi Aksara
- Novianti Javry, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian keunggulan bersaing dan kecerdasan emosi), Yogyakarta, deepublish :2016
- Nurhasnawati, Pendidikan Madrasah dan Prospeknya dalam Pendidikan Nasional (2015), Potensia:, Vol. 14, 2015
- Rahmat, Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sistem dan Perkembangannya sebelum dan sesudah kemerdekaan) (2014), Rihlah, Vol. 1, No. 2
- Sirpa'at, Transformasi Madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan: Vol. , No. 1, 2011
- Siskandar, Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah (2016), Cendekia: vol. 10, No. 2
- Subandi, Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi Analisis dan Subtantif Kebijakan Kurikulum Nasional)(2014), Terampil (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran dasar): Vol. 1, No. 1

- Suyatmini (2017), Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pelaksanaan Pembelajaran Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Ilmu Sosial, 27 (1)
- Wahyu Dwi Mulyono, Peran Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 2016
- Yusuf, Syamsul, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001)